



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpii>



Analisis sector service quality: analysis models value for money

Amril Amril¹, Helmy Syamsuri^{2*)}, Muhammad Ihsan HM Baso²

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 05th, 2023

Revised Sep 27th, 2023

Accepted Aug 08th, 2024

Keyword:

Kepuasan masyarakat,
Pelayanan,
Kualitas pelayanan

ABSTRAK

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik dan bertanggungjawab berbasis kinerja. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah beserta unit-unit kerja diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan dana, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi, efisien dan efektivitas terhadap pelayanan ke publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan metode Value For Money (VFM) yaitu menganalisis pengukur rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Value For Money. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar. Adapun hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa untuk rasio ekonomis dan efisiensi sudah memenuhi standar Value For Money sehingga anggaran dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat, sedangkan untuk rasio efektivitas belum memenuhi standar Value For Money tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan ke publik secara berkesinambungan agar efektivitas kinerja pemerintah tercapai lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Namun kinerja Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan adalah baik.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Helmy Syamsuri,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
Email: helmysyamsuri@stie.ypup.ac.id

Pendahuluan

Kinerja keuangan digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, sehingga kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Balabonienė & Večerskienė, 2014). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui implementasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Nomor, 12 C.E.). Pemerintah daerah pada umumnya berpacu dan bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja keuangan yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik yaitu tuntutan

pelaksanaan akuntabilitas yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya kebocoran, pemborosan, dan mendeteksi program kegiatan yang tidak layak secara ekonomi (Ardila & Putri, 2015).

Indikasi keberhasilan suatu daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan sejahtera, kehidupan demokrasi yang semakin maju, pemerataan, keadilan, serta adanya hubungan yang selaras antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila Lembaga sector public dikelola dengan memperhatikan pendekatan *Value For Money* (VFM) (Nsiah-Asare & Prempeh, 2016). Metode *value for money* (VFM) menurut Mardiasmo (2002) merupakan pengukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh sektor publik dengan yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga metode *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus juga mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama (Bajorek & Bevan, 2015).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Harry, S.L, *et.al* (2014) menunjukkan bahwa hasil penelitian menggunakan metode *Value For Money* kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran serta harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan Masyarakat (Malek & Gundaliya, 2021). Menurut Isna, A & Ayu,A.P (2015) berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode *value for money* menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja tidak ekonomis karena belum memenuhi standar *value for money*, analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana dan anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna, serta rasio efektivitas mengalami peningkatan sudah terpenuhi dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan (Ardila & Putri, 2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Evelyn,N.A, *et.al* (2016) yaitu.

The finding revealed that inadequate skilled personnel in the procurement sector and inadequate measures for monitoring and evaluation of the procurement policy to ensure Value For Money (VFM) are major challenges in the public procurement (Nsiah-Asare & Prempeh, 2016). It was recommended that to ensure value for money, Management supports for VFM programme at all levels of administration should be encouraged and procurement regulatory authorities in collaboration with public entities (Polytechnics) must ensure compliance through rigorous monitoring and evaluation of the procurement policy to ensure VFM. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Bajorek & Bevan (2015) yaitu the review found some evidence that performance-related-pay (PRP) schemes can be effective across the three domains of the public sector for which there was evidence available (health, education and the civil service), but findings within and between the sectors are mixed, with scheme effectiveness often dependent on scheme design and organisational context (Qodir, 2018).

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami analisis yaitu kinerja keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kota Makassar dengan menggunakan prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang berdasar pada perencanaan, pelaksanaan, dan penegndalian yang baik (Huy & Phuc, 2020). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada publik (Siemiatycki & Farooqi, 2012). Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terdapat di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pengelolaannya jelas dan jumlah semakin besar dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Sehingga pelaksanaan APBD harus lebih memperhatikan disiplin anggaran, baik pada saat akan memulai pelaksanaannya maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Pengelolaan APBD harus direncanakan sebaik-baiknya sesuai dengan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan metode *value for money*.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Oliver, 2013). Menurut Mardiasmo (2018), untuk mengukur kinerja pemerintah daerah maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut: 1) Sistem perencanaan dan pengendalian, 2) Spesifikasi teknik dan standarisasi, 3) Kompetensi teknis dan profesionalisme, 4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, dan 4) Mekanisme Sumber Daya Manusia.

The conceptual framework about financial performance clearly indicates that the major dimensions of financial performance under study include revenue collection performance, expenditure performance and value for money performance (Barrett, 2004; Bukenya, 2014). The conceptual dimensions of financial performance include Revenue collection performance, expenditure performance and financial accountability that focuses on achievement of value for money (Halim & Iqbal, 2007) and those of quality of accounting information are Reliability, Understandability, Relevance, Timeliness, and Accuracy for purposes of this research. The quality attributes are chosen on the basis of what is provided for in the Statement of accounting concepts (Barrett, 2004).

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. (Halim & Iqbal, 2007).

Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018), pendekatan Value For Money (VFM) bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat karena implementasinya akan memberikan manfaat; 1) efektivitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, 2) meningkatkan mutu pelayanan public, 3) biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya (resources); 4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 5) meningkatkan public costs awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik (Tsaregorodtseva & Miklashevsky, 2015).

Value for money audit conducted by the Director of Audit (auditor general) is a formal tool of evaluation on government programmes. It helps improve public accountability by providing information on the performance of the government. Efficiency, effectiveness and economy are the major components of value for money attainment with Efficiency being about making sure that a given course of action has been carried out and that appropriate outputs have been produced and that the ratio between inputs and outputs is the most favorable. Effectiveness is about making sure that a given course of action or investment of resources has achieved its intended results. The ultimate question is whether intended outcomes have been produced and the desired impact made and Economy is concerned with minimizing the cost of resources acquired or used, having regard to appropriate quality (Bukenya, 2014).

Mardiasmo (2009) mengungkapkan indikator Value For Money dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Mahmudi (2020) mendefinisikan Value For Money sebagai penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sector public. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya.

Matti & Naeem (2012) menjelaskan bahwa delivering improved public services at lower cost, also known formally as *value for money* (VfM), is often the main rationale for procuring large infrastructure projects through public-private partnerships (PPPs). Menurut Malek & Gundaliya (2021) bahwa For the Government projects, Value for Money (VFM) is an important parameter based on which the projects are procured through Public-Private Partnership (PPP) by the public sector and the objective of this paper is to identify and evaluate perceptions of VFM factors affecting Indian road projects undertaken by PPP.

Ekonomis

Ekonomis sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input, hendaknya di peroleh dengan harga lebih rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. (Mahmudi, 2011). Mardiasmo (2009) menambahkan bahwa ekonomi memiliki hubungan antara pasar dan masukan (cost of input) dimana merupakan bentuk praktik penghematan dengan melakukan pengelolaan secara cermat agar tidak terjadi pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Sehingga Ekonomis terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu untuk menghindari pengeluaran yang boros serta tidak produktif lagi.

Menurut Adam Oliver (2013) bahwa the use of behavioural economics to inform policy has over recent years been captured by those who advocate nudge interventions. This behavioural economic-informed method of regulation is hereby termed *budge*, to indicate that, rather than nudging citizens, behavioural economics might be used more appropriately in the public sector to help inform regulation that budges harmful private sector activities.

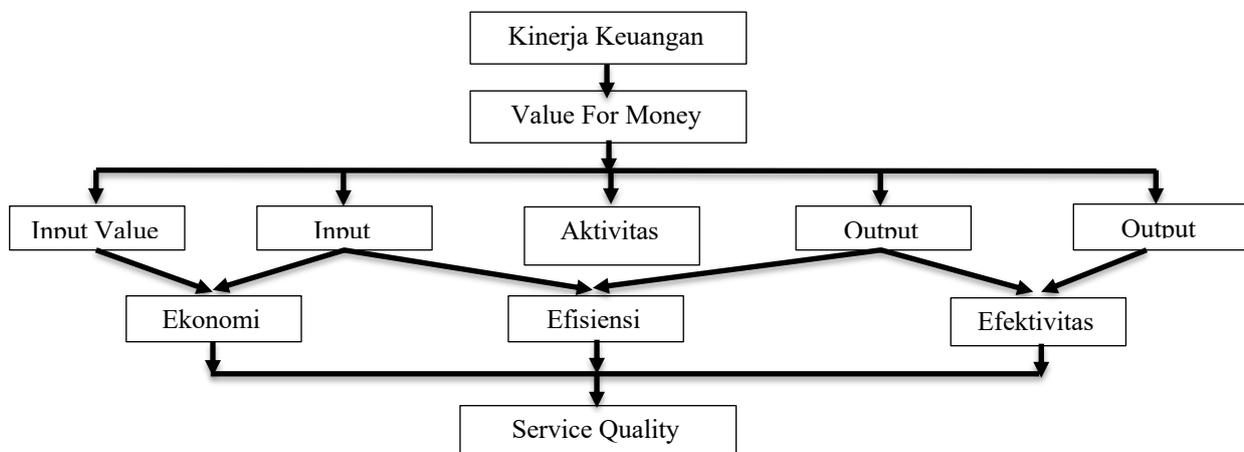
Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. (Mahmudi, 2011). Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Menurut Mardiasmo (2019), suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Efisiensi memiliki hubungan antara perbandingan output yang dihasilkan dari penggunaan input yang ada yang dalam hal ini erat dengan konsep produktivitas. Dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika hasil yang dicapai merupakan hasil penggunaan sumber daya dan dana seminimal mungkin (spending well).

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2011) bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efektivitas merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan atau ditargetkan., dimana ukuran kemampuan tersebut tergantung dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan atau dicapai sesuai dengan kemampuannya. Sehingga efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan dengan membandingkan outcome dan output nya dari suatu organisasi.

Value For Money menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah *input* melalui aktivitas kegiatan menjadi *output* yang diperlukan untuk memicu hasil (*outcome*) yang baik. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah seberapa ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan value for money dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Research framework

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017-2021 dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan berasal dari dokumen laporan yang dipublikasikan oleh BPS.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan value for money: (Mardiasmo, 2009)

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran pengeluaran}}$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran} \times 100\%}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti efisiensi

Jika > 100% berarti tidak efisiensi

Jika = 100% berarti efisiensi berimbang

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan} \times 100\%}{\text{Anggaran pendapatan}}$$

Ketentuan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika , < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektivitas berimbang

Hasil dan Pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang merupakan sistem anggaran mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang digunakan. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Makassar berupaya melakukan pengawasan dengan berdasarkan pada prinsip pengelolaan yang baik guna mencapai *good governance*.

Tabel 1. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan
2017	3.451.473.588	3.816.105.605	3.476.355.172	3.893.899.898
2018	3.526.081.002	4.117.588.616	3.700.838.038	4.298.108.616
2019	3.744.737.042	4.262.952.984	3.841.117.255	4.399.952.984
2020	2.969.786.003	4.217.870.000	3.323.662.287	4.238.870.000
2021	3.049.778.248	3.291.203.782	3.284.342.522	3.924.511.169

Sumber: Laporan APBD Kota Makassar, Makassar Dalam Angka tahun 2017 sampai tahun 2021

Tabel 1 diatas merupakan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money yaitu dengan menggunakan prinsip value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas.

Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melaksanakan pelayanan kepada publik. Dengan menggunakan rumus efisiensi, maka rasio ekonomis Kota Makassar tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Ekonomis Kota Makassar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Persen (%)	Keterangan
2017	90,4%	Ekonomis
2018	85,6%	Ekonomis
2019	87,8%	Ekonomis
2020	70,4%	Ekonomis
2021	92,7%	Ekonomis

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas, perkembangan rasio ekonomis Kota Makassar dari tahun 2017 – 2021 termasuk dalam kategori ekonomis, walaupun berfluktuasi persentase pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan 4,8% dari 90,4% menjadi 85,6%. Tahun 2018 sebesar 85,6% mengalami penurunan menjadi 87,8% tahun 2019 sebesar 2,2%. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 17,4%, dan pada tahun 2020 mengalami kembali penurunan sebesar 22,3%. Pemerintah Kota Makassar selama ini menggunakan prinsip sistem disiplin anggaran pada setiap kegiatan pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini merupakan

salah satu cara untuk menghindari pemborosan anggaran sehingga dapat menekan pengeluaran dengan mencapai tujuan secara ekonomis.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan output/input yang berkaitan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Kota Makassar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Persen (%)	Keterangan
2017	99,3%	Efisiensi
2018	95,3%	Efisiensi
2019	97,5%	Efisiensi
2020	89,4%	Efisiensi
2021	92,9%	Efisiensi

Sumber : data diolah

Rasio efisiensi pada Kota Makassar periode tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 99,3% menjadi 95,3% pada tahun 2018 sebesar 4%. Tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,2%, namun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari 97,5% ke 89,4% sebesar 8,1%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan ke tahun 2021 sebesar 3,5% dari 89,4% ke 92,9%. Kinerja pemerintah Kota Makassar berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio efisiensi berada pada kategori efisiensi. Pemerintah Kota Makassar tersebut melaksanakan pembangunan seperti pengembangan infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta peningkatan teknologi untuk mengelola sumber daya alam sehingga untuk mengoptimalkan pendapatan dan untuk meningkatkan efisiensi untuk tahun yang akan datang.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Rasio Efektivitas Kota Makassar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Persen (%)	Keterangan
2017	89,3%	Tidak efektif
2018	86,1%	Tidak efektif
2019	87,3%	Tidak efektif
2020	78,4%	Tidak efektif
2021	83,7%	Tidak efektif

Sumber : data diolah

Dari tabel 4 terlihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan kinerja pemerintah Kota Makassar termasuk kategori tidak efektif, karena realisasi pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Sehingga untuk mencapai efektivitas, Pemerintah Kota Makassar melakukan kebijakan-kebijakan yaitu melalui pengembangan pada setiap Sub Satuan Wilayah Pembangunan yang telah ditetapkan lokasi pengembangan dan arah kegiatan yang harus dikembangkan.

Pengukuran kinerja organisasi sektor swasta diarahkan pada peningkatan laba dan kepuasan pemilik, sedangkan tujuan utama organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik, sehingga manajemen kinerja di organisasi publik harus diarahkan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut (Balabonienė & Večerskienė, 2014). Pengukuran kinerja adalah alat yang menggambarkan peningkatan organisasi karena tidak mungkin bagi organisasi mana pun untuk bertindak secara efektif tanpa mengukur kinerjanya. Pentingnya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik semakin diperkuat dengan adanya manajemen publik baru yang bertujuan untuk menyesuaikan metode pengukuran kinerja yang diterapkan pada organisasi swasta dengan organisasi di sektor publik agar kinerja dapat diatur dengan lebih efektif dan agar kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan lebih baik (Balabonienė & Večerskienė, 2014). Pemerintah Daerah Kota Makassar berupaya melakukan pengawasan dengan berdasarkan pada prinsip pengelolaan yang baik guna mencapai *good governance*. Dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah digunakan prinsip value for money yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Penggunaan ekonomi perilaku untuk menginformasikan kebijakan selama beberapa tahun terakhir telah ditangkap oleh mereka yang menganjurkan intervensi dorongan. Metode regulasi yang diinformasikan oleh ekonomi perilaku ini disebut dengan istilah *budge*, untuk menunjukkan bahwa, alih-alih mendorong warga negara, ekonomi perilaku dapat digunakan dengan lebih tepat di sektor publik untuk membantu

menginformasikan regulasi yang dapat mengurangi aktivitas sektor swasta yang merugikan. Berdasarkan pengukuran dengan rasio ekonomis, kinerja pemerintahan daerah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 termasuk ke dalam kategori ekonomis, meskipun nilainya berfluktuasi. Pemerintah Kota Makassar menggunakan prinsip sistem disiplin anggaran pada setiap kegiatan pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghindari pemborosan anggaran sehingga dapat menekan pengeluaran dengan mencapai tujuan secara ekonomis.

Berdasarkan pengukuran rasio efisiensi, kinerja pemerintah daerah Kota Makassar terus mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021. Meskipun begitu, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan berada pada kategori efisiensi. Hal tersebut karena, pemerintah Kota Makassar melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, juga peningkatan teknologi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal tersebut menjadikan pendapatan yang optimal untuk efisiensi periode selanjutnya. Efektivitas sistem informasi akuntansi (SIA) dalam organisasi sektor publik (PSO) telah diakui memainkan peran penting dalam memperoleh kinerja berkelanjutan (SP). Namun demikian, efektivitas SIA tidak dapat mencapai SP dengan sendirinya karena perubahan yang cepat di dunia ekonomi global. Oleh karena itu, terdapat peningkatan permintaan akan kerangka kerja evaluasi yang dianggap sesuai dengan karakteristik PSO untuk mengorientasikan, mengelola, dan menilai operasi SIA untuk mencapai SP (Huy & Phuc, 2020).

Berdasarkan pengukuran rasio efektivitas, kinerja pemerintah daerah Kota Makassar masuk ke dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut dilihat dari total realisasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan anggaran pendapatan yang direncanakan. pemerintah daerah Kota Makassar melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui pengembangan pada wilayah pembangunan dalam rangka mencapai efektivitas. Hasil penelitian mendukung penelitian Harry, S.L, et.al (2014) bahwa dengan menggunakan metode Value For Money kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih efisien dan tepat sasaran serta harus ditingkatkan agar masyarakat merasakan hasil dari otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (Malek & Gundaliya, 2021).

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Isna, A & Ayu, A.P (2015) yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja belum ekonomis karena belum memenuhi standar value for money, analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan dana dan anggaran untuk mencapai program kerja masih belum sesuai, dan rasio efektivitas mengalami peningkatan, sudah terpenuhi dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Ardila & Putri, 2015). Dalam rangka mencapai "*value for money*" yang optimal, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan mereka. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan seefektif mungkin. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kinerja keuangan daerah dengan fokus pada "*value for money*."

Simpulan

Pada tahun 2017 sampai tahun 2021, analisis rasio ekonomis menunjukkan berada pada kategori ekonomis, dan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja pemerintah Kota Makassar ekonomis dan telah memenuhi standar ekonomis Value For Money (VFM). Analisis rasio efisiensi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 berada pada kategori efisiensi walaupun perkembangannya berfluktuasi dan memenuhi standar efisiensi VFM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerja sudah tepat guna. Sedangkan analisis rasio efektivitas berada pada kategori tidak efektif dan belum memenuhi standar efektivitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Makassar periode tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan menggunakan prinsip Value For Money adalah baik khusus untuk ekonomis dan efisiensi, namun pada analisis efektivitas belum memenuhi efektivitas. Dengan demikian Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan dan memfokuskan penggunaan anggaran belanjanya, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran yang melampaui dari target yang telah ditentukan, dan dapat mengefisienkan anggaran belanjanya dengan baik dan tepat untuk menjalankan program kerja setiap unit kerja instansinya yang berada dibawah anungan Pemerintah Kota Makassar.

Setiap instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan nanti dapat meningkatkan lagi efektivitas, karena efektivitas suatu program kerja atau kegiatan dapat meningkat apabila masyarakat mengalami kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Pencapaian "*value for money*" yang optimal adalah proses yang berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik ini dan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen keuangan publik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas, melakukan perencanaan dengan cermat, melakukan evaluasi rutin, menetapkan kebijakan yang jelas, dan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.

Referensi

- Adam Oliver. (2013), "From Nudging to Budging: Using Behavioural Economics to Inform Public Sector Policy", *Journal of Social Policy*, Volume 42, Issue 4, October 2013, pp.685-700. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0047279413000299>
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Bajorek, Z. M., & Bevan, S. M. (2015). Performance-related-pay in the UK public sector: A review of the recent evidence on effectiveness and value for money. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 2(2), 94–109.
- Balabonienė, I., & Večerskienė, G. (2014). The peculiarities of performance measurement in universities. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, 605–611.
- Barrett, P. (2004). Financial management in the public sector—how accrual accounting and budgeting enhances governance and accountability. *CPA Forum*, 24.
- Bukenya, M. (2014). Quality of accounting information and financial performance of Uganda's public sector. *American Journal of Research Communication*, 2(5), 183–203.
- Evelyn Nsiah Asare, Kwado Boateng Prempeh. (2016). *Measures of Ensuring Value for Money in Public Procurement: A Case of Selected Polytechnics in Ghana*. *Journal of Logistics Management* 2016, 5(1):22-31. DOI: 10.5923/j.logistics.20160501.04.
- Ewama J L (2003). The Impact of the Auditor Generals Controls on the Management of Public Finances MUBS research bulletin July-Dec. 2003, p 17.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2007). Pengelolaan keuangan daerah. *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*.
- Harry Saputra, L., Liando., David Paul, E., L., Ingriani, E. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.3 September 2014, Hal 1686-1694.
- Huy, P. Q., & Phuc, V. K. (2020). The impact of public sector scorecard adoption on the effectiveness of accounting information systems towards the sustainable performance in public sector. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1717718.
- Ingrida Balabonienė and Giedre Vecerskiene. ((2015), "The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization", *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Volume 213, 1 Desember 2015, Pages 314-320. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.544>
- Isna Ardila., Ayu Anindya, P. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15 No.1/Maret, Hal 78-85.
- Mahmudi (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Mahmudi (2020). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga; Jakarta.
- Malek, M., & Gundaliya, P. (2021). Value for money factors in Indian public-private partnership road projects: An exploratory approach. *Journal of Project Management*, 6(1), 23–32.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Matti Siemiatycki and Naem Farooqi (2012), "Value for Money and Risk in Public-Private Partnerships", *Journal of the American Planning Association*, Volume 78, 2012-Issue 3, Pages 286-299. <https://doi.org/10.1080/01944363.2012.715525>
- Mohammad Shakil Malek and Pradip Gundaliya (2021), "Value for Money Factors in Indian Public-Private Partnership Road Projects: An Exploratory Approach", *Journal of Project Management* 6 (2021) 23-32, doi: 10.5267/j.jpmm.2020.10.002
- Moses Bukenya (2014). "Quality of Accounting Information and Financial Performance of Uganda's", *American Journal of Research Communication*, Volume 2 (5): 183-203, ISSN: 2325-4076, www.usa-journals.com
- Nomor, P. P. (58 C.E.). *Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nsiah-Asare, E., & Prempeh, K. B. (2016). *Measures of ensuring value for money in public procurement: A case of selected polytechnics in Ghana*.
- Oliver, A. (2013). From nudging to budging: using behavioural economics to inform public sector policy. *Journal of Social Policy*, 42(4), 685–700.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pham Quang Huy & Vu Kien Phuc. (2020), "The Impact of Public Sector Scorecard Adoption on the Effectiveness of Accounting Information Systems Towards the Sustainable Performance in Public Sector",

-
- Journal Cogent Business & Management, 7:1, 1717718, DOI: <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1717718>
- Qodir, A. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- SAC 3, (1990). Public Sector Accounting Standards Board of the Australian Accounting Research Foundation and the Accounting Standards Review Board. Australia
- Siemiatycki, M., & Farooqi, N. (2012). Value for money and risk in public-private partnerships: Evaluating the evidence. *Journal of the American Planning Association*, 78(3), 286–299.
- Tsaregorodtseva, O. V, & Miklashevsky, A. A. (2015). Different languages, same sun, and same grass: Do linguistic stimuli influence attention shifts in Russian? *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 215, 279–286.